



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI SUSIANTO
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 189168

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.392.500.000

1. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 235.250.000
2. Tanah Seluas 1935 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.277.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 759.500.000
4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.807.900.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 22.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
1.200.000.000
4. MOBIL, HONDA CITY HB 1.5L RS CVT Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 335.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.052.664.065

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 12.253.064.065



III. HUTANG

Rp. 1.264.401.283

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.988.662.782

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.